

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly, 2014, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Black, Henry Campbell, 1990, *Black's Law Dictionary*, West Publishing.
- Falah Miftahul, 2010, *Sejarah Kota Tasikmalaya*, Uga Tatar Sunda dan Yayasan Masyarakat Sejarahwan Indonesia Cabang Jawa Barat, Tasikmalaya.
- Friedman, M.Lawrence terjemahan M.Khozim, 2009, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung.
- Hamidi, Jazim, 2012, *Teori dan Hukum Perancangan Perda*, UB Press, Malang
- Huda, Ni'Matul, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung.
- _____, 2013, *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Pustaka Pelajar
- Johnny Ibrahim, 2007, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publising, Malang
- Manan, Abdul, 2016, *Politik Hukum Studi Perbandingan dalam Praktik Ketatanegaraan Islam dan Sistem Hukum Barat*, Prenadamedia Group, Jakarta
- MD, Moh. Mahfud, 1998, *Politik Hukum Di Indonesia*, Pustaka LP3S, Jakarta.
- _____, 2009, *Politik Hukum Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2010, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers.
- Moelong, Lexy.J, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muchsan, 1981, *Beberapa Catatan Tentang Hukum Administrasi Negara Dan Peradilan Administrasi Negara Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Nasution, Mirza, 2015, *Politik Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Pusantara, Medan.
- Santoso, Agus, 2013, *Menyingkap Tabir Otonomi Daerah Di Indonesia* Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Sukriono, Didik, 2013, *Hukum Konstitusi, dan Konsep Otonomi*, Setara Press, Malang.

Soemadiningrat, Otje Salman, 2011, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer: Telaah Kritis terhadap Hukum Adat sebagai Hukum yang Hidup dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung.

Syahr, Saidus, 1981, *Undang-Undang Perkawinan Dan Masalah Pelaksanaannya (Dalam Dari Segi Hukum Islam)*, Alumni, Bandung

Syaikani, Imam, A.Ahsin Thohari, 2015, *Dasar-dasar Politik Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Tanya, Bernard L, 2011, *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Wahjono, Padmo, 1983, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia.

Wijaya, HAW, 2005, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Yani, Ahmad, 2011, *Pembentukan Undang-Undang dan Perda*, Rajawali Pers, Jakarta.

Yulianti, 2011, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Rajawali Pers, Jakarta.

Perundang-undangan

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Amandemen Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 4).

Internet

Pro Kontra Rencana Pembuatan Peraturan untuk Melindungi Pejabat Publik, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol14965/pro-kontra-rencana-pembuatan-peraturan-untuk-melindungi-pejabat-publik>, diakses tanggal 7 April 2017.

<http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2014/01/buku-saku-40hak.pdf> - diakses 1 Juni 2017

<http://lib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak-83080.pdf>, diakses pada 27 Juni 2017

<http://blog.ummy.ac.id/sapto/2014/06/16/konflik-penegakan-syariah-di-tasikmalaya-dalam-pendekatan-filosofis/>, diakses pada 27 Juni 2017

<https://nasional.sindonews.com/read/1194583/12/putusan-mk-mendagri-tidak-berwenang-batalkan-perda-1491401808>, diakses pada 14 Agustus 2017



<http://nasional.kompas.com/read/2017/06/14/22392261/putusan.mk.cabut.kewenangan.mendagri.batalan.perda.provinsi>, diakses pada 14 Agustus 2017

<https://www.youtube.com/watch?v=F54W3wObERk>, diakses pada 14 Agustus 2017

<https://www.youtube.com/watch?v=8bhkbowcimo>, diakses pada 14 Agustus 2017